

## Narasi Keadilan Gender di Media Sosial: Analisis Wacana pada Gerakan Feminisme Digital

### *Narratives of Gender Justice on Social Media: Discourse Analysis of the Digital Feminism Movement*

1Putri Salsabila Evita Wara, 2Alem Febri Sonni, 3Muh Akbar

1,2,3 Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia [warapse24e@student.unhas.ac.id](mailto:warapse24e@student.unhas.ac.id)

#### ABSTRACT

*The development of social media has become a strategic space for the dissemination of ideas and advocacy related to gender justice, including through the digital feminism movement. This study aims to analyze the construction of gender justice narratives in the digital feminism movement on social media, focusing on communication strategies, discourse forms, and messages conveyed. Using a qualitative method with Norman Fairclough's critical discourse analysis approach, data was collected through documentation of content from social media accounts actively promoting feminist issues, including posts, hashtags, and audience interactions. The results of the study show that gender justice narratives on social media are constructed through a combination of educational messages, criticism of inequality, and the strengthening of collective female identity. The use of thematic hashtags, emotionally evocative visuals, and inclusive language has proven effective in building online solidarity. However, this study also found polarization of opinion and resistance from some social media users, which has the potential to hinder the movement's goals. These findings are expected to contribute to the development of more effective digital communication strategies in promoting gender justice in the new media era.*

**Keywords:** *Critical Discourse Analysis, Digital Communication, Digital Feminism, Gender Justice, Social Media,*

#### ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah menjadi ruang strategis bagi penyebaran ide dan advokasi terkait keadilan gender, termasuk melalui gerakan feminisme digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi narasi keadilan gender dalam gerakan feminisme digital di media sosial, dengan fokus pada strategi komunikasi, bentuk wacana, dan pesan yang disampaikan. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis model Norman Fairclough, data dikumpulkan melalui dokumentasi konten dari akun media sosial yang aktif dalam mengusung isu feminisme, termasuk unggahan, tagar (*hashtag*), dan interaksi audiens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi keadilan gender di media sosial dibangun melalui kombinasi pesan edukatif, kritik terhadap ketidaksetaraan, dan penguatan identitas kolektif perempuan. Strategi penggunaan hashtag tematik, visual yang memancing emosi, dan bahasa

inklusif terbukti efektif dalam membangun solidaritas daring. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya polarisasi opini dan resistensi dari sebagian pengguna media sosial yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan gerakan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi komunikasi digital yang lebih efektif dalam mempromosikan keadilan gender di era media baru.

**Kata kunci:** Analisis Wacana Kritis, Feminism Digital, Keadilan Gender, Komunikasi Digital, Media Sosial.

## PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial dalam dua dekade terakhir telah membawa transformasi mendasar dalam pola komunikasi masyarakat. Awalnya, media sosial hanya berfungsi sebagai sarana interaksi personal untuk berbagi pesan singkat, foto, atau menjalin pertemanan daring. Namun, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, munculnya *smartphone*, serta inovasi platform digital seperti *Facebook*, *Twitter (X)*, *Instagram*, *TikTok*, dan *YouTube*, media sosial berkembang menjadi ruang publik baru yang menampung diskursus sosial, budaya, politik, bahkan ekonomi (Boyd, 2014; Van Dijck, 2013). Konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas (1962/1989) menekankan pentingnya ruang di mana warga dapat bertukar pikiran, menyampaikan aspirasi, dan membentuk opini publik secara bebas. Kini, fungsi tersebut banyak dijalankan oleh media sosial, yang memberi kesempatan bagi setiap individu, tanpa batasan status sosial, untuk menyuarakan pandangan mereka (Papacharissi, 2010). Media sosial menjadi arena deliberasi publik, di mana isu-isu politik, kebijakan publik, gerakan sosial, hingga gaya hidup, dibicarakan dan diperdebatkan secara terbuka.

Namun, perbedaan signifikan dengan ruang publik konvensional adalah sifat media sosial yang desentralistik, partisipatif, dan real-time (Castells, 2012). Ruang publik digital ini tidak lagi dimonopoli oleh institusi negara atau media arus utama, tetapi diisi oleh masyarakat luas, termasuk individu biasa yang kini memiliki kekuatan sebagai produser informasi (*prosumer*) (Jenkins, Ford, & Green, 2013). Fenomena ini memperlihatkan demokratisasi informasi, sekaligus mempercepat terbentuknya opini publik melalui viralitas konten (Sunstein, 2017). Meski demikian, perkembangan media sosial sebagai ruang publik juga menghadirkan tantangan serius: banjir informasi yang tidak terverifikasi, polarisasi politik, ujaran kebencian, hingga komodifikasi data pengguna (Fuchs, 2014). Dengan kata lain, media sosial memang memperluas partisipasi publik, tetapi sekaligus memerlukan literasi digital dan regulasi etis agar ruang publik baru ini dapat berfungsi secara sehat (Livingstone, 2019).

Dari perkembangan tersebut, salah satu fenomena penting yang muncul adalah gerakan feminisme digital. Perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial telah melahirkan bentuk baru aktivisme perempuan yang sebelumnya banyak bergerak di ruang fisik (Mendes, Ringrose, & Keller, 2019). Feminisme digital hadir sebagai respons atas dua hal: pertama, adanya keterbatasan akses perempuan terhadap ruang publik konvensional, dan kedua, potensi media sosial untuk

menciptakan ruang diskursif baru di mana suara perempuan dapat lebih didengar dan diperhitungkan (Jackson, Bailey, & Welles, 2020). Gerakan ini memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, hingga TikTok sebagai arena advokasi. Tagar (hashtag) menjadi simbol sekaligus strategi gerakan—misalnya #MeToo, #TimesUp, dan di Indonesia #MulaiBicara atau #GerakBersama—yang memungkinkan isu kekerasan seksual, kesenjangan gender, dan diskriminasi dapat diangkat ke permukaan secara masif (Gill & Orgad, 2018). Hal ini sejalan dengan teori jaringan komunikasi (*network society*) yang dikemukakan oleh Manuel Castells (2012), di mana media digital memungkinkan terbentuknya solidaritas berbasis jaringan yang cair, cepat, dan inklusif.

Karakter utama feminisme digital adalah desentralistik, partisipatif, dan interseksi (Banet-Weiser, 2018). Gerakan ini tidak lagi dikendalikan oleh organisasi formal semata, melainkan oleh individu maupun komunitas yang terhubung secara daring. Perempuan dari berbagai latar belakang dapat berbagi pengalaman personal, membangun solidaritas, serta mendorong perubahan sosial tanpa harus hadir dalam ruang fisik yang sama (Keller, Mendes, & Ringrose, 2016). Di sinilah terlihat bagaimana media digital berfungsi sebagai “ruang publik alternatif” yang memperkuat suara kelompok yang sebelumnya termarginalisasi. Meski demikian, feminisme digital juga menghadapi tantangan. Di balik kemampuannya menyuarakan kesetaraan, ruang digital sering kali dipenuhi dengan *cyberbullying*, misogini daring, dan kekerasan berbasis gender *online* (Henry & Powell, 2015). Selain itu, komodifikasi isu feminis oleh platform digital—misalnya menjadikan narasi pemberdayaan perempuan sebagai strategi pemasaran—dapat mengurangi substansi perjuangan (Rottenberg, 2018). Dengan demikian, feminisme digital bukan sekadar peluang, tetapi juga arena baru yang membutuhkan strategi kritis agar tetap konsisten pada tujuan emansipatorisnya.

Dalam konteks ini, urgensi menghadirkan narasi keadilan gender di ruang maya menjadi semakin jelas. Di era digital, ruang maya telah menjadi arena utama dalam pertukaran gagasan, pembentukan opini publik, hingga advokasi isu-isu sosial (Fraser, 1990). Salah satu isu penting yang menuntut perhatian adalah keadilan gender, karena ketidaksetaraan peran, representasi, dan akses perempuan masih menjadi masalah global maupun nasional (Connell, 2009). Kehadiran media sosial sebagai ruang publik baru membuka peluang bagi munculnya narasi tandingan yang menantang dominasi wacana patriarkal yang selama ini mengakar kuat di ruang publik konvensional. Urgensi ini berangkat dari fakta bahwa media digital memungkinkan penyebaran pesan yang lebih luas, cepat, dan lintas batas (Coudry & Hepp, 2017). Isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, diskriminasi di tempat kerja, representasi perempuan dalam media, hingga kesenjangan akses pendidikan dapat disuarakan secara kolektif melalui kampanye digital (Fotopoulou, 2016). Narasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat advokasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran kritis (Freire, 1970/2005) di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang lebih aktif mengakses media sosial. Lebih jauh, narasi keadilan gender di ruang maya bersifat urgensial karena mampu mengubah pola komunikasi top-down menjadi lebih partisipatif (Carstensen, 2020). Jika dulu wacana feminisme dan kesetaraan gender banyak

didorong oleh lembaga formal atau aktivis tertentu, kini suara perempuan biasa pun dapat membentuk resonansi publik melalui medium digital. *Hashtag activism* seperti #MeToo, #TimesUp, atau gerakan lokal seperti #MulaiBicara menunjukkan bagaimana pengalaman personal bisa bertransformasi menjadi isu kolektif dengan dampak sosial yang nyata (Clark, 2016).

Namun, urgensi ini juga dihadapkan pada tantangan serius. Ruang maya tidak bebas dari resistensi; praktik misogini daring, pelecehan digital, hingga penyebaran ujaran kebencian berbasis gender masih marak terjadi (Citron, 2014). Di sinilah pentingnya memperkuat narasi keadilan gender agar ruang maya tidak hanya menjadi arena ekspresi bebas, tetapi juga ruang yang adil, aman, dan inklusif bagi semua gender. Dengan demikian, menghadirkan narasi keadilan gender di ruang maya bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan bagian integral dari perjuangan menuju transformasi sosial yang lebih egaliter. Penelitian mengenai fenomena ini memiliki relevansi yang kuat dengan studi komunikasi dan gender. Dari perspektif komunikasi, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana media—khususnya media hiburan populer maupun *platform* digital—membentuk pola pikir, persepsi, dan perilaku khalayak (McQuail, 2010). Narasi yang ditawarkan media tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pesan simbolik yang mengonstruksi realitas sosial mengenai relasi, idealisasi pasangan, dan peran gender dalam hubungan interpersonal. Hal ini selaras dengan kajian *media effect* yang menyoroti bagaimana paparan media dapat memengaruhi sikap dan preferensi individu (Bryant & Oliver, 2009).

Sementara itu, dari perspektif gender, penelitian ini menyoroti bagaimana representasi romantika dan narasi kesetaraan berkelindan dengan konstruksi sosial mengenai laki-laki dan perempuan (Butler, 1990). Analisis terhadap hal ini penting, sebab konstruksi gender yang muncul dalam media populer maupun dalam gerakan digital akan memengaruhi cara generasi muda memaknai peran gender dalam hubungan intim maupun dalam masyarakat luas (Banet-Weiser & Portwood-Stacer, 2017). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap studi gender dalam hal mengungkap bagaimana media digital menjadi arena produksi sekaligus reproduksi makna tentang keadilan, ketidaksetaraan, dan ekspektasi gender. Lebih jauh, relevansi penelitian ini juga terletak pada konteks akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai persinggungan antara budaya populer, komunikasi massa, dan konstruksi gender di era globalisasi (Curran & Couldry, 2012). Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan wawasan bagi pendidik, pembuat kebijakan, maupun praktisi media untuk lebih kritis dalam melihat bagaimana narasi media berimplikasi pada cara generasi muda memandang hubungan, kesetaraan, dan pasangan hidup. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana narasi keadilan gender dibangun dalam gerakan feminisme digital di media sosial serta menemukan wacana dominan yang muncul dalam narasi tersebut

## METODE

Paradigma penelitian yang digunakan dalam kajian berjudul “*Narasi Keadilan Gender di Media Sosial: Analisis Wacana pada Gerakan Feminisme Digital*” adalah paradigma kualitatif dengan pendekatan kritis. Paradigma ini berangkat dari pemahaman bahwa realitas sosial tidak

bersifat objektif dan tunggal, melainkan dikonstruksi melalui bahasa, simbol, serta interaksi di ruang digital (Berger & Luckmann, 1991). Dengan demikian, media sosial dipandang bukan hanya sebagai ruang komunikasi, tetapi juga arena produksi dan reproduksi makna tentang keadilan gender (Couldry & Hepp, 2017). Landasan filosofisnya bertumpu pada konstruktivisme sosial, di mana narasi-narasi feminisme digital dipahami sebagai hasil konstruksi kolektif yang mencerminkan sekaligus mempengaruhi kesadaran sosial masyarakat (Fairclough, 2010). Dalam kerangka kritis, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi narasi, melainkan berupaya membongkar relasi kuasa, ideologi, serta struktur dominasi yang melekat dalam wacana mengenai keadilan gender (van Dijk, 2008). Paradigma ini memandang bahwa bahasa di media sosial bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan juga instrumen hegemoni maupun perlawanan (Foucault, 1980). Oleh karena itu, analisis diarahkan untuk memahami bagaimana gerakan feminisme digital memproduksi wacana alternatif, menantang stereotip patriarkis, sekaligus memperjuangkan ruang yang lebih adil bagi perempuan (Mendes, Ringrose, & Keller, 2019). Dengan perspektif ini, penelitian tidak hanya menggali konstruksi makna, tetapi juga berorientasi pada transformasi sosial melalui kesadaran kritis atas praktik wacana yang berkembang (Horkheimer, 2002).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dokumentasi digital dan observasi daring (*online observation/netnografi*). Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan teks, unggahan, komentar, tagar (*#hashtag*), dan konten visual yang berhubungan dengan narasi keadilan gender di media sosial, khususnya yang diproduksi dalam konteks gerakan feminisme digital. Data ini diperoleh dari berbagai platform media sosial seperti *Twitter*, *Instagram*, atau *Facebook* yang sering menjadi ruang diskusi dan advokasi isu feminisme. Selain dokumentasi, penelitian juga memanfaatkan observasi daring untuk melihat interaksi pengguna, pola percakapan, serta dinamika penyebaran wacana feminisme digital. Observasi ini penting untuk memahami konteks sosial dan kultural dari narasi yang muncul, sehingga tidak hanya melihat teks sebagai objek statis, tetapi juga sebagai praktik komunikasi yang hidup (Kozinets, 2010).

Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dengan isu keadilan gender, misalnya perdebatan tentang kesetaraan hak, kritik terhadap praktik patriarki, maupun advokasi feminis di ruang digital. Pengumpulan data ini dilengkapi dengan studi literatur dari penelitian sebelumnya yang membahas feminisme digital dan analisis wacana, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi dan memperkuat validitas temuan (Bowen, 2009).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK), yang dipandang relevan untuk membongkar makna, ideologi, dan relasi kuasa yang terkandung dalam narasi feminisme digital di media sosial. Analisis wacana kritis menempatkan bahasa tidak hanya sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang terkait erat dengan produksi pengetahuan, hegemoni, dan resistensi (Fairclough, 2010; van Dijk, 2008).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis Norman Fairclough yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu:

1. Analisis teks. Mengkaji aspek linguistik seperti diksi, metafora, atau struktur kalimat yang membentuk narasi feminisme digital.
2. Praktik wacana. Menelaah proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks di media sosial, termasuk bagaimana tagar, komentar, atau unggahan dikonstruksi serta disebarakan.
3. Praktik sosial-budaya. Menyingkap bagaimana wacana feminisme digital berhubungan dengan konteks sosial yang lebih luas, seperti ideologi patriarki, isu kesetaraan gender, dan perlawanan terhadap dominasi budaya (Fairclough, 1995).

Selain itu, analisis ini juga diperkaya dengan pendekatan kognisi sosial dari Teun A. van Dijk, yang menekankan pada hubungan antara teks, kognisi (pengetahuan, ideologi), dan konteks sosial (van Dijk, 2008). Dengan menggabungkan dua perspektif ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana narasi keadilan gender diproduksi, dimaknai, dan digunakan sebagai strategi resistensi oleh gerakan feminisme digital.

Tabel 1

## Logical Framework

Komponen	Uraian
<b>Input (Masukan)</b>	Paradigma kualitatif-kritis berbasis konstruktivisme sosial.- Teori feminisme, teori wacana kritis (Fairclough/van Dijk/Foucault).- Fenomena sosial: narasi keadilan gender di media sosial melalui gerakan feminisme digital.- Sumber data: unggahan, komentar, tagar, diskusi online di platform media sosial.
<b>Proses (Metode)</b>	Pengumpulan data: dokumentasi teks/visual di media sosial, observasi daring, dan studi literatur terkait.- Analisis data: analisis wacana kritis untuk mengurai struktur teks, konteks sosial, dan relasi kuasa dalam narasi feminisme digital.- Interpretasi makna: menyingkap ideologi, hegemoni, dan strategi resistensi yang terkandung dalam wacana.
<b>Output (Hasil Antara)</b>	Deskripsi narasi feminisme digital yang muncul di media sosial.- Pemetaan bentuk konstruksi wacana mengenai keadilan gender.- Identifikasi relasi kuasa, ideologi patriarkis, dan praktik resistensi dalam wacana feminisme digital.
<b>Outcome (Hasil Akhir/Manfaat)</b>	Kontribusi teoretis: memperkaya kajian feminisme digital dan analisis wacana kritis.- Kontribusi praktis: meningkatkan kesadaran kritis masyarakat tentang keadilan gender di ruang digital.- Rekomendasi strategis: pemanfaatan media sosial sebagai ruang advokasi dan transformasi sosial berbasis gender equality.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks dan praktik wacana di media sosial yang berkaitan dengan narasi keadilan gender dalam gerakan feminisme digital. Teks yang dimaksud mencakup berbagai bentuk konten digital, seperti unggahan (*post*), komentar, *caption*, *meme*,

infografis, hingga tagar (#hashtag) yang digunakan untuk menyuarakan isu feminisme. Selain teks tertulis, unit analisis juga mencakup elemen visual (gambar atau video) yang mengandung makna simbolik dalam mendukung narasi keadilan gender. Di samping itu, unit analisis juga memperhatikan praktik diskursif, yakni bagaimana wacana feminisme digital diproduksi, disebarkan, dan diterima di ruang digital. Hal ini mencakup interaksi antar pengguna, respons publik terhadap isu kesetaraan gender, serta strategi aktivisme digital yang dilakukan oleh komunitas atau gerakan feminis. Dengan kata lain, analisis tidak hanya berfokus pada teks sebagai entitas linguistik, tetapi juga pada konteks sosial yang melingkupinya (Fairclough, 1995; Wodak & Meyer, 2016). Dengan unit analisis ini, penelitian mampu menyingkap konstruksi makna, ideologi, dan relasi kuasa yang melekat dalam wacana feminisme digital, sekaligus memahami dinamika sosial yang membentuk dan dipengaruhi oleh narasi keadilan gender di media sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi dominan dalam gerakan feminisme digital umumnya berfokus pada upaya menegakkan kesetaraan gender dan mengkritisi struktur sosial yang masih sarat dengan bias patriarkal. Melalui media sosial, aktivis feminis memproduksi wacana yang menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi berbasis gender, penolakan terhadap praktik kekerasan seksual, serta advokasi atas hak-hak perempuan dalam ruang publik maupun privat. Narasi ini kerap muncul dalam bentuk seruan kolektif, tagar kampanye, serta konten edukatif yang mudah diakses dan dibagikan, sehingga memperluas jangkauan gerakan. Dalam konteks global, kampanye *#MeToo* menjadi salah satu contoh narasi dominan yang menyerukan keberanian perempuan untuk bersuara mengenai pengalaman kekerasan dan pelecehan seksual. Narasi ini menegaskan pentingnya solidaritas dan membuka ruang diskusi publik mengenai ketidakadilan gender. Sementara itu, di Indonesia muncul kampanye digital seperti *#MulaiBicara* atau gerakan *#SayaJuga*, yang membawa narasi serupa dalam konteks lokal dengan mendorong korban kekerasan seksual untuk berani menyuarakan pengalaman mereka tanpa stigma. Selain itu, gerakan Perempuan Bergerak di berbagai platform juga membangun narasi interseksional dengan menyoroti isu pekerja perempuan, hak reproduksi, serta representasi perempuan dalam ruang politik. Dengan demikian, narasi dominan dalam gerakan feminisme digital tidak hanya sebatas perlawanan simbolik terhadap ketidakadilan, tetapi juga menjadi strategi komunikasi yang efektif untuk membangun kesadaran kritis, solidaritas, serta mobilisasi kolektif dalam memperjuangkan keadilan gender baik pada level global maupun lokal.

### Analisis Bahasa dan Simbol dalam Narasi Dominan Gerakan Feminisme Digital

#### 1. Bahasa

Bahasa yang digunakan dalam feminisme digital cenderung lugas, tegas, dan mengandung seruan kolektif. Misalnya, dalam kampanye *#MulaiBicara* di Instagram, banyak unggahan menggunakan kalimat seperti: “Diam bukan pilihan, suaramu berharga” atau “Berani bicara berarti menyelamatkan banyak nyawa.” Diksi ini menekankan urgensi, keberanian, dan solidaritas. Pada kampanye global *#MeToo*, penggunaan kalimat sederhana “*Me Too*” (saya juga) menjadi bahasa universal yang mudah dipahami lintas bahasa dan budaya, tetapi sarat makna perlawanan serta solidaritas.

## 2. Simbol

Hashtag sebagai simbol digital: Tagar seperti *#MeToo*, *#MulaiBicara*, atau *#LawanPatriarki* tidak hanya menjadi alat kategorisasi konten, tetapi juga simbol perlawanan kolektif. Visual kepalan tangan perempuan: Banyak konten feminis di Twitter dan Instagram menampilkan ilustrasi tangan perempuan terkepal dengan warna ungu, melambangkan kekuatan dan solidaritas. Meme dan infografik: Dalam kampanye *#GerakBersama*, akun-akun feminis di Indonesia membuat infografik sederhana dengan ikon gender, kutipan data tentang pelecehan seksual, atau simbol palang merah untuk menunjukkan urgensi isu. Simbol budaya: Beberapa aktivis feminis Indonesia mengadaptasi ilustrasi perempuan berhijab dengan slogan “Suara Kita, Hak Kita”, yang menunjukkan bahwa perjuangan feminisme tidak bertentangan dengan identitas religius dan budaya lokal.

## 3. Makna

Bahasa tegas dan simbol visual ini menciptakan makna resistensi sekaligus solidaritas. Bahasa seperti “Jangan Diam” atau “Kita Bersama” memperkuat posisi perempuan sebagai subjek aktif, bukan objek yang ditindas. Sementara itu, simbol visual (kepalan tangan, warna ungu, hijab dalam ilustrasi feminis) membangun identitas kolektif yang menghubungkan isu global dengan realitas lokal. Dengan cara ini, feminisme digital memanfaatkan kombinasi bahasa dan simbol untuk menciptakan ruang wacana alternatif yang inklusif, mudah dipahami, dan mampu menjangkau audiens luas.

**Tabel 2**

Tabel Analisis Bahasa dan Simbol dalam narasi dominan Gerakan Feminisme Digital

Aspek	Bentuk	Contoh Konkret	Makna
Bahasa	Seruan kolektif	“Diam bukan pilihan, suaramu berharga” (kampanye <i>#MulaiBicara</i> )	Mengajak korban untuk berani bersuara, membangun solidaritas kolektif.
	Kalimat sederhana namun kuat	“ <i>Me Too</i> ” (kampanye global <i>#MeToo</i> )	Bahasa universal yang mudah dipahami lintas budaya, melambangkan kesamaan pengalaman.
	Diksi tegas	Kata-kata: <i>pelecehan</i> , <i>kekerasan</i> , <i>patriarki</i>	Menolak eufemisme, memperlihatkan realitas ketidakadilan gender secara lugas.
Simbol	Hashtag sebagai simbol digital	<i>#MeToo</i> , <i>#MulaiBicara</i> , <i>#LawanPatriarki</i>	Identitas kolektif, alat mobilisasi wacana, simbol perlawanan digital.

	Ilustrasi visual	Gambar kepalan tangan perempuan berwarna ungu	Melambungkan kekuatan, perlawanan, dan solidaritas feminis.
	Infografik & meme	Infografik kampanye <b>#GerakBersama</b> berisi data pelecehan seksual	Mempermudah penyebaran informasi, edukasi publik, dan menguatkan legitimasi gerakan.
	Simbol budaya	Ilustrasi perempuan berhijab dengan slogan “ <i>Suara Kita, Hak Kita</i> ”	Menunjukkan feminisme dapat berdampingan dengan identitas religius dan budaya lokal.

### Dinamika Narasi Tandingan dalam Gerakan Feminisme Digital

Secara keseluruhan, implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa gerakan feminisme digital di Indonesia berpotensi memperkuat demokratisasi ruang publik dengan membuka akses yang lebih setara bagi suara perempuan. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan gerakan dalam mengelola narasi, memanfaatkan simbol lokal, serta menghadapi resistensi budaya yang masih kuat. Oleh karena itu, media sosial sebagai ruang publik perlu dipahami bukan hanya sebagai medium komunikasi, tetapi sebagai arena politik wacana yang sangat menentukan arah perjuangan keadilan gender di era digital. Dalam konteks gerakan feminisme digital, narasi tandingan merujuk pada wacana yang muncul untuk menolak atau mendeligitimasi gagasan keadilan gender yang dibawa oleh kelompok feminis. Dinamika ini bersifat dialektis: setiap kali gerakan feminisme membangun narasi tentang kesetaraan, partisipasi, dan pemberdayaan, hampir selalu muncul kontra-wacana yang berusaha mempertahankan dominasi nilai patriarkis atau ideologi konservatif. Fenomena tersebut tampak jelas pada media sosial Indonesia, khususnya dalam interaksi pada akun feminis digital seperti *@JakartaFeminist*, *@lawanpatriarki*, atau *@perempuanberkisah*. Unggahan kampanye dengan tagar *#MulaiBicara* atau *#LawanPatriarki*, misalnya, sering kali direspons dengan komentar pro-kontra: sebagian mendukung narasi kesetaraan gender, sementara sebagian lain melontarkan tuduhan bahwa feminisme adalah produk Barat, merusak budaya, atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama (Maryani et al., 2021).

Bentuk narasi tandingan yang lebih terorganisir dapat ditemukan pada akun *@indonesiatanpafeminis.id*, yang secara konsisten membingkai feminisme sebagai ancaman terhadap moralitas dan nilai perempuan “ideal” Indonesia, yakni perempuan yang patuh, sabar, dan berperan utama di ranah domestik (Maryani et al., 2021). Secara umum, dinamika narasi tandingan dalam gerakan feminisme digital dapat dilihat dalam tiga pola utama: pertama, delegitimasi gerakan feminis dengan mengaitkan feminisme sebagai ideologi asing yang bertentangan dengan budaya dan agama; kedua, distorsi isu dengan menyempitkan feminisme hanya pada aspek kebebasan seksual, sehingga mengaburkan tujuan lebih luas terkait kesetaraan

hak; dan ketiga, reproduksi stereotip gender yang mempertahankan peran perempuan sebagai subordinat dari laki-laki (Sokowati, 2022).

Meski demikian, keberadaan narasi tandingan tidak selalu melemahkan gerakan feminis. Sebaliknya, resistensi tersebut justru memperkuat visibilitas wacana feminisme karena memicu diskusi publik yang berulang mengenai isu keadilan gender. Dengan demikian, media sosial dapat dipahami sebagai ruang publik agonistik (Mouffe, 2005), di mana perbedaan pandangan tidak dapat sepenuhnya dihapus, melainkan dikelola melalui kontestasi yang berkelanjutan dan produktif. Selain dalam bentuk wacana ideologis, narasi tandingan terhadap feminisme digital juga termanifestasi melalui praktik serangan balik (*backlash*), *trolling*, dan berbagai ekspresi misogini digital. Backlash sering muncul ketika gerakan feminis mengangkat isu-isu sensitif, seperti kekerasan berbasis gender atau hak reproduksi, yang kemudian memicu reaksi keras berupa komentar bernuansa kebencian, penghinaan, atau pelecehan verbal. Misalnya, unggahan akun @lawanpatriarki mengenai kampanye #GerakBersama kerap dibanjiri komentar yang meremehkan pengalaman penyintas, bahkan menyalahkan korban (*victim blaming*). Bentuk backlash ini menunjukkan adanya resistensi emosional yang bukan sekadar kritik ideologis, tetapi juga usaha membungkam suara perempuan (Banet-Weiser, 2018).

Fenomena *trolling* juga menjadi tantangan serius dalam gerakan feminisme digital. Banyak aktivis feminis yang menghadapi serangan akun anonim atau bot, yang menyebarkan komentar ofensif untuk mengganggu jalannya percakapan atau mengalihkan isu. *Trolling* ini kerap memanfaatkan humor sarkastik, *meme*, atau hinaan seksis untuk melemahkan kredibilitas gerakan. Di sisi lain, praktik misogini digital tampak melalui normalisasi ujaran kebencian berbasis gender, misalnya komentar yang merendahkan perempuan sebagai “tidak pantas bicara politik” atau “lebih baik kembali ke dapur.” Praktik ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan bagi partisipan gerakan feminis, tetapi juga berpotensi mengurangi partisipasi perempuan dalam ruang publik digital. Dinamika backlash, *trolling*, dan misogini digital ini memperlihatkan bahwa media sosial adalah medan kontestasi yang kompleks: ia membuka peluang bagi artikulasi narasi keadilan gender, tetapi sekaligus memunculkan risiko pelemahan semangat kolektif akibat serangan balik yang terstruktur maupun spontan. Namun, justru dari tantangan inilah gerakan feminisme digital belajar mengembangkan strategi perlawanan kreatif, seperti membangun solidaritas daring, mengarsipkan kasus *trolling* untuk advokasi hukum, serta menggunakan humor balik (*counter-memeing*) sebagai bentuk *resistance* (Mendes, Ringrose, & Keller, 2019). Dengan demikian, kehadiran serangan balik digital bukan hanya hambatan, melainkan juga pemicu lahirnya inovasi strategi dalam memperkuat narasi keadilan gender di ruang publik daring.

### **Implikasi bagi Gerakan Feminisme dan Media Sosial sebagai Ruang Publik**

Salah satu implikasi paling signifikan dari berkembangnya narasi keadilan gender di media sosial adalah kemampuannya mendorong perubahan pada ranah kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, keberhasilan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 menjadi contoh konkret bagaimana kampanye digital dapat menggerakkan

opini publik sekaligus menekan lembaga legislatif untuk merespons aspirasi masyarakat. Selama bertahun-tahun, rancangan undang-undang ini mengalami kebuntuan politik karena resistensi dari sebagian kelompok yang menilai isu kekerasan seksual masih tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Namun, melalui kampanye digital yang masif di Twitter, Instagram, dan platform lainnya, narasi feminisme digital berhasil membalikkan situasi. Tagar seperti **#SahkanRUUPKS**, **#GerakBersama**, hingga **#MulaiBicara** berfungsi sebagai alat mobilisasi opini, menyebarkan data kasus kekerasan seksual, dan menarasikan pengalaman korban secara langsung.

Strategi komunikasi digital ini memiliki tiga dampak penting:

1. Membangun tekanan public. Kampanye digital menciptakan gelombang opini yang begitu besar, sehingga isu kekerasan seksual tidak bisa lagi diabaikan oleh media arus utama maupun politisi.
2. Mengubah framing isu. Jika sebelumnya pembahasan kekerasan seksual kerap dibungkus dalam bahasa moralitas atau “aib keluarga,” feminisme digital berhasil menggeser wacana ke arah isu hak asasi manusia dan keadilan gender.
3. Memberikan legitimasi politik. Dukungan luas masyarakat yang terukur melalui interaksi digital memperkuat posisi kelompok advokasi dan memberikan legitimasi kepada pembuat kebijakan untuk mengambil langkah progresif.

Dengan demikian, pengesahan UU TPKS menjadi bukti bahwa narasi feminisme digital tidak hanya berhenti pada level simbolik atau kultural, tetapi juga menembus level struktural berupa perubahan regulasi negara. Hal ini menegaskan kekuatan media sosial sebagai ruang politik baru di mana suara publik mampu mengintervensi proses pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan ini sekaligus memperlihatkan tantangan berkelanjutan. Setelah pengesahan UU TPKS, narasi tandingan tetap muncul, misalnya berupa tuduhan bahwa undang-undang tersebut “mengabaikan nilai-nilai moral” atau “mendorong kebebasan seksual.” Dengan kata lain, meski narasi feminisme digital berhasil mendorong lahirnya kebijakan progresif, perjuangan untuk mempertahankan implementasi dan efektivitas kebijakan tetap harus dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial tidak sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik digital tempat ide, gagasan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan gender diproduksi dan diperdebatkan. Bagi gerakan feminisme, implikasinya adalah terbukanya peluang yang lebih luas untuk menyuarakan pengalaman perempuan, membangun solidaritas, serta memperluas advokasi melampaui batas geografis dan kelas sosial. Narasi dominan yang muncul dalam kampanye digital seperti **#MeToo** atau **#MulaiBicara** memperlihatkan bahwa media sosial mampu mengubah budaya diam (*silence culture*) menjadi budaya bersuara (*speaking out culture*). Dengan demikian, feminisme digital menjadi medium strategis untuk mendorong kesadaran kritis masyarakat sekaligus menekan pengambil kebijakan agar lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender. Bagi media sosial sebagai ruang publik, implikasinya terletak pada fungsinya sebagai arena demokratis baru yang memungkinkan

munculnya wacana tandingan terhadap dominasi budaya patriarkal. Melalui praktik wacana digital, masyarakat dapat mengakses informasi, berdiskusi, dan terlibat dalam advokasi tanpa harus terikat pada batasan ruang fisik. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa media sosial tidak netral; ia menjadi arena pertarungan antara narasi feminis dengan narasi anti-feminis. Hal ini menegaskan bahwa ruang publik digital tidak hanya menyediakan kesempatan untuk memperkuat demokrasi, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa polarisasi wacana, penyebaran stigma, dan resistensi dari kelompok konservatif.

## SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa gerakan feminisme digital di media sosial membangun narasi dominan yang berfokus pada kesetaraan gender, perlawanan terhadap kekerasan seksual, serta solidaritas kolektif perempuan. Narasi tersebut diwujudkan melalui penggunaan bahasa tegas dan inklusif, seperti diksi pelecehan, patriarki, dan solidaritas, serta simbol-simbol digital seperti hashtag (*#MeToo*, *#MulaiBicara*, *#LawanPatriarki*), ilustrasi visual kepalan tangan berwarna ungu, hingga adaptasi simbol lokal seperti perempuan berhijab. Strategi bahasa dan simbol ini memperlihatkan bagaimana feminisme digital memanfaatkan ruang publik daring sebagai arena advokasi, edukasi, dan mobilisasi sosial. Namun, penelitian juga mengungkap adanya narasi tandingan yang berusaha melemahkan feminisme melalui bahasa normatif (kodrat, kehormatan, aurat) dan simbol satir atau meme seksis. Pertarungan narasi ini menegaskan bahwa media sosial merupakan arena wacana yang tidak netral, melainkan tempat perebutan makna mengenai gender, budaya, dan kekuasaan. Dari perspektif praktik sosial, gerakan feminisme digital di Indonesia merefleksikan negosiasi antara nilai kesetaraan gender dengan budaya patriarkal yang masih mengakar. Kehadirannya mendorong pergeseran dari budaya diam menuju budaya bersuara, sekaligus memperlihatkan adaptasi feminisme dengan identitas lokal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa feminisme digital bukan hanya praktik komunikasi, tetapi juga praktik sosial dan politik yang berkontribusi pada perjuangan keadilan gender di Indonesia.

### Ucapan Terimakasih :

Jika diperlukan, berisi tentang ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi kepada penulis dalam penyelesaian naskah dimaksud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banet-Weiser, S. (2018). *Empowered: Popular feminism and popular misogyny*. Duke University Press.
- Banet-Weiser, S., & Portwood-Stacer, L. (2017). The traffic in feminism: An introduction to the commentary and criticism on popular feminism. *Feminist Media Studies*, 17(5), 884–888.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Penguin Books.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

- Boyd, D. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
- Bryant, J., & Oliver, M. B. (2009). *Media effects: Advances in theory and research* (3rd ed.). Routledge.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Carstensen, T. (2020). Feminist hashtag activism: Digital discourses on sexual violence in Germany. *Feminist Media Studies*, 20(7), 1010–1026.
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity.
- Citron, D. K. (2014). *Hate crimes in cyberspace*. Harvard University Press.
- Connell, R. W. (2009). *Gender in world perspective* (2nd ed.). Polity.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.
- Curran, J., & Couldry, N. (2012). *Media, society, world: Social theory and digital media practice*. Polity.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon.
- Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, 25/26, 56–80.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (30th Anniversary ed.). Continuum. (Original work published 1970).
- Fuchs, C. (2014). *Social media: A critical introduction*. Sage.
- Gill, R., & Orgad, S. (2018). The shifting terrain of sex and power: From the 'sexualization of culture' to #MeToo. *Sexualities*, 21(8), 1313–1324.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press. (Original work published 1962).
- Henry, N., & Powell, A. (2015). Embodied harms: Gender, shame, and technology-facilitated sexual violence. *Violence Against Women*, 21(6), 758–779.
- Horkheimer, M. (2002). *Critical theory: Selected essays*. Continuum.
- Jackson, S. J., Bailey, M., & Welles, B. F. (2020). *#HashtagActivism: Networks of race and gender justice*. MIT Press.
- Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). *Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture*. NYU Press.
- Keller, J., Mendes, K., & Ringrose, J. (2016). Speaking 'unspeakable things': Documenting digital feminist responses to rape culture. *Journal of Gender Studies*, 27(1), 22–36.
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan.

- Kozinets, R. V. (2010). *Netnography: Doing ethnographic research online*. SAGE.
- Livingstone, S. (2019). Audiences in an age of datafication: Critical questions for media research. *Television & New Media*, 20(2), 170–183.
- Maryani, E., Nurjaman, A., & Kurniawan, A. (2021). Anti-feminism movement on Instagram: A counter public against feminism in Indonesia. *Frontiers in Sociology*, 6, 1–10.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage.
- Mendes, K., Ringrose, J., & Keller, J. (2019). *Digital feminism: Activism in the 21st century*. Oxford University Press.
- Mendes, K., Ringrose, J., & Keller, J. (2019). *Digital feminist activism: Girls and women fight back against rape culture*. Oxford University Press.
- Mietzner, M. (2022). Political activism in digital Indonesia: Social movements and online campaigns. *Asian Survey*, 62(5), 749–774.
- Mouffe, C. (2005). *On the political*. Routledge.
- Papacharissi, Z. (2010). *A private sphere: Democracy in a digital age*. Polity.
- Rottenberg, C. (2018). *The rise of neoliberal feminism*. Oxford University Press.
- Sokowati, M. (2022). Feminist digital activism and participatory culture in Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 7(2), 200–214.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Van Dijck, J. (2013). *The culture of connectivity: A critical history of social media*. Oxford University Press.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of critical discourse studies* (3rd ed.). SAGE.